Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

Ivan Dicksan Hasannudin[1], Agus Fatah Hidayat[2], Arifah Rosmajudi[3], Astri Siti Fatimah[4], Deni Sudrajat[5], M. Ikrar Budijaya[6], Tine Badriatin[7*]

[1,2,3,4,5,6] Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara YPPT Priatim Tasikmalaya
[7]Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Tasikmalaya City in 2024. In this context, local government budget management is a critical factor in determining how well a region can meet the needs of its community. Using a literature review method, this study focuses on collecting data from various relevant sources, including official government documents, academic journals, and other supporting data related to the research subject. This method allows the researcher to gain a deep understanding of budget management policies and practices in Tasikmalaya City. The research results indicate that in the management of the 2023 Tasikmalaya City APBD, there was a special focus on allocating funds to programs that directly impact the community; this reflects the local government's efforts to improve public welfare through the provision of better public services. These programs cover the sectors of education, health, infrastructure, and local economic empowerment, and by focusing on these programs, it is hoped that a positive impact on the quality of life for the community in Tasikmalaya City can be achieved.

Keywords: Effectiveness, Management of the Regional Revenue and Expenditure Budget

Article history:
Submission: March 9, 2026
Revised: May 18, 2026
Accepted: May 25, 2026
Published: June 16, 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya pada tahun 2024. Dalam hal ini Pemerintahan Daerah terkait dengan pengelolaan anggaran merupakan aspek penting yang menentukan seberapa baik suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, termasuk dokumen resmi pemerintah, jurnal akademis, dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan dan praktik pengelolaan anggaran di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan APBD Kota Tasikmalaya tahun 2023, terdapat perhatian khusus terhadap pengalokasian dana kepada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik. Program-program tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi daerah, dan dengan fokus pada program-program tersebut, diharapkan dapat tercipta dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Kata kunci : Efektivitas, Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

*Corresponding author
Email:tinebadriatin@gmail.com

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta sumber daya yang ada di wilayahnya. Salah satu aspek penting dalam otonomi daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan serta pelayanan publik. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menekankan beberapa prinsip dalam penyusunan APBD, antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan berorientasi pada hasil. Transparansi berarti bahwa semua informasi terkait anggaran harus dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik dikelola. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat sangat penting agar aspirasi dan kebutuhan warga dapat terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Sementara itu, orientasi pada hasil memastikan bahwa setiap alokasi anggaran harus diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang jelas.

Proses penyusunan APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. RKPD harus disusun berdasarkan analisis situasi dan kondisi daerah serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan pembahasan dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan terhadap rancangan APBD. Proses ini mencakup dialog antara eksekutif dan legislatif guna memastikan bahwa semua kepentingan stakeholder terwakili dalam dokumen anggaran.

Setelah APBD disahkan, tahap selanjutnya merupakan pelaksanaan anggaran yang harus diawasi secara ketat. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat daerah sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD juga sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target-target yang telah ditetapkan serta dampak dari program-program yang dilaksanakan.

Meskipun terdapat pedoman yang jelas, pengelolaan APBD masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman mengenai peraturan baru di kalangan aparat pemerintahan, serta dinamika politik lokal yang dapat mempengaruhi proses penganggaran, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai peraturan terbaru agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Pengelolaan anggaran dalam organisasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berbagai ahli telah memberikan pendapatnya mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dalam organisasi publik. Menurut Mardiasmo menyatakan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dapat membantu organisasi publik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal tersebut

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

karena pengelolaan anggaran yang baik dapat membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara optimal (Mardiasmo, 2016).

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien juga dapat membantu organisasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut karena pengelolaan anggaran yang baik dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat, sehingga dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sangat penting dalam organisasi publik.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien juga dapat membantu organisasi publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, hal tersebut karena pengelolaan anggaran yang baik dapat membantu organisasi dalam menyediakan informasi yang akurat dan transparan tentang penggunaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, sehingga pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi public.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien juga dapat membantu organisasi publik dalam mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, hal tersebut karena pengelolaan anggaran yang baik dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi biaya yang tidak perlu dan menguranginya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, sehingga pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sangat penting dalam mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi organisasi publik (Kuncoro, 2017).

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien (Mulyadi, 2015) menjelaskan dapat membantu organisasi publik dalam meningkatkan kemampuan dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian, hal tersebut karena pengelolaan anggaran yang baik dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian, sehingga pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sangat penting dalam meningkatkan kemampuan organisasi publik dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien membantu organisasi publik dalam meningkatkan kualitas keputusan, hal tersebut karena pengelolaan anggaran yang baik dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi alternatif dan memilih alternatif yang terbaik, sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan, sehingga pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sangat penting dalam meningkatkan kualitas keputusan organisasi publik.

Pengelolaan anggaran dalam organisasi publik merupakan aspek penting yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas pelayanan publik. Berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami bagaimana pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efektif. Dalam konteks ini, sepuluh teori efektivitas pengelolaan anggaran akan dibahas berdasarkan pandangan para ahli yang relevan, dengan fokus pada literatur yang diterbitkan sejak tahun 2017.

Teori kinerja anggaran menekankan pentingnya menghubungkan alokasi sumber daya dengan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja harus menjadi bagian integral dari proses penganggaran, hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dan menunjukkan hasil yang dicapai. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan anggaran (Mardiasmo, 2016).

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Teori partisipasi stakeholder berargumen bahwa melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat meningkatkan efektivitasnya. Menurut Hidayat (2020), partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran memungkinkan adanya masukan yang lebih beragam dan relevan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program-program pemerintah.

Akuntabilitas publik merupakan teori yang menekankan tanggung jawab pemerintah kepada publik terkait penggunaan anggaran. Akuntabilitas dijadikan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik agar masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas, diharapkan akan tercipta kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Wijayanti, 2008).

Inovasi dalam pengelolaan anggaran menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penerapan teknologi digital dalam proses penganggaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, seperti sistem e-budgeting memungkinkan pemantauan real-time terhadap penggunaan anggaran, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan.

Beberapa hasil penelitian yang relevan diantaranya penelitian yang mengungkapkan bahwa efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih kurang optimal, terutama dalam hal alokasi dana dan implementasi program pembangunan. Tantangan utama meliputi ketidakselarasan antara perencanaan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, lemahnya sistem pengawasan internal, serta keterbatasan kapasitas teknis aparatur pemerintah dalam mengelola anggaran berbasis kinerja. Akibatnya, distribusi dana seringkali tidak tepat sasaran, menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Rinaldi Rinaldi et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang periode 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif, artinya pemerintah daerah berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya. Namun, tingkat efisiensi keuangan daerah selama periode tersebut rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien, karena porsi penggunaan input (belanja) telah lebih dari 90 persen dibandingkan jumlah output (pendapatan), bahkan pada beberapa tahun belanja daerah melebihi anggaran yang tersedia sehingga dibiayai dengan pinjaman/hutang (Trianto, 2016).

Hasil penelitian berikutnya (S et al., 2019) menunjukan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banggai tergolong baik, tingkat efisiensi keuangan menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2014-2018. Hasil penelitian berukutnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat antara tahun 2015 hingga 2017 memiliki tingkat efektivitas yang baik, dengan rata-rata kriteria yang efektif. Namun, tingkat efisiensi selama periode yang sama tergolong kurang efisien, disebabkan oleh sifat organisasi tersebut sebagai entitas non-penghasil yang hanya melakukan transaksi pengeluaran tanpa menghasilkan pendapatan (Pavecta et al., 2017).

Penelitian yang dilakukan (Antasena et al., 2023) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka antara tahun 2016-2020 memiliki tingkat efisiensi yang kurang, dengan rata-rata sebesar 97,50%, yang mengindikasikan bahwa proses perencanaan anggaran belum optimal dan pengeluaran belanja didominasi oleh belanja pegawai. Namun,

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah tergolong baik dengan rata-rata 96,48%, yang menunjukkan bahwa program-program pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia telah mencapai target yang ditetapkan.

Dari hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai berjalan kurang efektif, hal tersebut disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap mekanisme dan peraturan yang berlaku, sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada belanja daerah, seperti belanja modal dan pegawai. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai antara lain sumber daya manusia, peranan pemimpin, komitmen organisasi, sistem informasi, dan karakteristik organisasi (Gendong et al., 2024).

Hasil penelitian yang dilakukan (Syauqi et al., 2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor belum stabil, yang tercermin dari indikator desentralisasi fiskal yang rendah akibat ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif dari variabel investasi, pendapatan per kapita, dan pajak daerah terhadap kinerja keuangan, sementara PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan, urutan prioritas strategi yang diusulkan dengan metode AHP merupakan: pertama, meningkatkan pengawasan; kedua, pendidikan dan pelatihan; ketiga, komunikasi dan komitmen pencapaian sasaran; keempat, penerapan regulasi insentif dan disinsentif; serta kelima, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Baubau belum dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Rasio kemandirian di Kota Baubau menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang belum optimal (Mahmuda, 2019). Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa efektivitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih kurang efektif, yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam manajemen anggaran. Hal ini penting agar alokasi dana dapat dioptimalkan, sehingga mendukung terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Rinaldi et al., 2024).

Dari berbagai penelitian di atas dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di berbagai daerah, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan APBD masih kurang optimal, terutama dalam hal alokasi dana dan implementasi program pembangunan. Tantangan utama meliputi ketidakselarasan antara perencanaan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, lemahnya sistem pengawasan internal, serta keterbatasan kapasitas teknis aparatur pemerintah dalam mengelola anggaran berbasis kinerja.

Penelitian lain menunjukkan bahwa rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah di beberapa daerah mencapai tingkat yang efektif, namun tingkat efisiensi keuangan daerah masih kurang efisien. Hal ini disebabkan oleh porsi penggunaan input (belanja) yang telah lebih dari 90 persen dibandingkan jumlah output (pendapatan), bahkan pada beberapa tahun belanja daerah melebihi anggaran yang tersedia sehingga dibiayai dengan pinjaman/hutang. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di beberapa daerah memiliki tingkat efektivitas yang baik, namun tingkat efisiensi masih kurang efisien.

Penelitian yang dilakukan di beberapa daerah lain menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki tingkat efisiensi yang kurang, dengan rata-rata sebesar 97,50%, yang

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

mengindikasikan bahwa proses perencanaan anggaran belum optimal dan pengeluaran belanja didominasi oleh belanja pegawai. Namun, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah tergolong baik dengan rata-rata 96,48%, yang menunjukkan bahwa program-program pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia telah mencapai target yang ditetapkan.

Pengelolaan APBD yang efisien dan efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Tasikmalaya. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk program-program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial. Ketika anggaran dikelola dengan baik, alokasi sumber daya dapat diarahkan kepada sektor-sektor prioritas yang membutuhkan perhatian lebih, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan APBD juga berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan sistem pengelolaan anggaran yang jelas dan terukur, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi penggunaan dana publik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga kota. Ketika masyarakat merasa bahwa anggaran dikelola dengan transparan, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah serta berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Pengelolaan APBD yang baik juga berperan dalam pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi daerah. Dengan merencanakan belanja secara hati-hati dan mempertimbangkan pendapatan daerah secara realistis, pemerintah dapat menghindari defisit anggaran yang berpotensi menimbulkan masalah ekonomi jangka panjang. Selain itu, pengeluaran yang terencana dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pengelolaan APBD secara efisien dan efektif mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya. Dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam perencanaan anggaran, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang termasuk investasi dalam program-program ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk generasi mendatang

METODE

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya tahun 2024 bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana anggaran tersebut dikelola dan digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menganalisis data yang relevan tanpa harus melakukan pengumpulan data primer yang mungkin memakan waktu dan biaya.

Dalam studi literatur, peneliti akan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengelolaan APBD, baik di tingkat lokal maupun nasional. Penelitian ini juga akan mencakup analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di Kota Tasikmalaya serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, peneliti dapat memahami konteks pengelolaan anggaran di daerah tersebut serta tantangan-tantangan yang

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

dihadapi dalam implementasinya.

Teknik analisis dalam metode studi literatur meliputi beberapa langkah penting. Pertama, peneliti harus melakukan pencarian literatur secara sistematis untuk menemukan sumber-sumber yang relevan. Setelah itu, peneliti perlu melakukan seleksi terhadap sumber-sumber tersebut berdasarkan kriteria tertentu seperti kredibilitas, relevansi, dan tanggal publikasi. Selanjutnya, analisis konten dilakukan untuk mengekstrak informasi penting dari setiap sumber yang telah dipilih, yang termasuk merangkum temuan-temuan utama dan mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dari data yang ada.

Hasil analisis disusun dalam bentuk narasi atau laporan yang menggambarkan efektivitas pengelolaan APBD Kota Tasikmalaya tahun 2024 berdasarkan bukti-bukti dari literatur yang telah ditelaah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis literatur ini, penelitian dapat memberikan wawasan berharga tanpa harus terjebak pada keterbatasan waktu dan sumber daya.

HASIL DAN DISKUSI

Pengelolaan keuangan daerah menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah secara efektif dan efisien, yang berarti bahwa setiap unit anggaran dan investasi yang dilakukan harus menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, daerah dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga mencakup pengawasan terhadap pengeluaran agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran, sehingga kekayaan daerah dapat memberikan dampak positif bagi seluruh warga.

Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan daerah untuk mendistribusikan sumber daya regional dengan adil dan merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan tidak hanya berfokus pada efisiensi penggunaan anggaran tetapi juga pada aspek keadilan sosial. Dengan mendistribusikan sumber daya secara tepat, pemerintah daerah dapat mengurangi kesenjangan antara berbagai kelompok masyarakat dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan publik yang berkualitas, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan di wilayah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan berorientasi pada hasil, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dilakukan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan prinsip yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan penggunaan anggaran dapat diakses oleh publik. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas mengenai alokasi anggaran, tujuan penggunaan dana, serta hasil yang diharapkan dari setiap program atau kegiatan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memahami bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan dan dapat memberikan masukan atau kritik yang konstruktif. Selain itu, transparansi juga berfungsi untuk mencegah

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena semua tindakan pemerintah dapat diawasi oleh publik.

Akuntabilitas merupakan aspek lain yang penting dalam pengelolaan APBD. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran kepada publik melalui laporan keuangan yang jelas dan terperinci, yang termasuk pertanggungjawaban atas setiap pengeluaran, serta pencapaian hasil dari program-program yang dibiayai oleh APBD. Dengan akuntabilitas yang baik, masyarakat akan memiliki kepercayaan lebih terhadap pemerintah daerah, karena mereka merasa bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan umum. Selain itu, akuntabilitas juga menciptakan ruang bagi evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

Prinsip efisiensi menekankan pentingnya penggunaan anggaran untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu melakukan analisis biaya-manfaat sebelum melaksanakan program atau proyek tertentu agar tidak terjadi pemborosan sumber daya. Di sisi lain, prinsip keadilan menuntut agar alokasi anggaran dilakukan secara proporsional dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap kelompok masyarakat harus mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dengan memadukan kedua prinsip ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan manfaat dari pengelolaan APBD secara adil.

Prinsip partisipatif mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan program. Melalui forum-forum musyawarah atau konsultasi publik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait penggunaan anggaran. Sementara itu, tanggung jawab menekankan perlunya integritas tinggi dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah untuk memastikan semua kewajiban terpenuhi tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mematuhi semua prinsip ini—tertib administrasi, tepat waktu dalam pelaksanaan anggaran—pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Tasikmalaya, terdapat peraturan yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dasar hukum yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, efektif, efisien, ekonomis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah di Kota Tasikmalaya merupakan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tujuan lain dari pengelolaan keuangan daerah merupakan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, efektif, efisien, ekonomis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan daerah dan mengurangi biaya yang

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

tidak perlu.

Implementasi pengelolaan keuangan daerah di Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun berdasar data yang diperoleh mengenai uraian dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi APBD 2024
Kota Tasikmalaya

URAIAN	2024	
	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	1.835.998.899.754,00	1.792.496.242.472,06
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	371.966.736.453,00	351.777.584.751,06
Pajak Daerah	163.574.975.200,00	168.952.023.618,00
Retribusi Daerah	191.037.673.605,00	168.040.917.264,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.798.558.734,00	6.798.537.734,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.555.528.914,00	7.986.106.135,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.464.032.163.301,00	1.440.718.657.721,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.194.342.070.000,00	1.174.724.029.446,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	269.690.093.301,00	265.994.628.275,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.555.528.914,00	7.986.106.135,00
BELANJA DAERAH	1.857.505.942.539,00	1.790.597.242.391,64
Belanja Operasi	1.688.823.665.450,00	1.635.468.452.199,64
Belanja Barang dan Jasa	783.175.025.321,00	739.471.162.696,00
Belanja Bunga	300.000.000,00	287.869.906,64
Belanja Subsidi	445.000.000,00	370.000.000,00
Belanja Hibah	98.650.652.967,00	97.664.724.593,00
Belanja Bantuan Sosial	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00
BELANJA MODAL	165.347.198.121,00	152.907.959.308,00
Belanja Modal Tanah	3.870.000.000,00	3.847.895.080,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.067.612.996,00	72.971.536.933,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.659.080.363,00	31.809.801.708,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.101.722.062,00	43.667.091.198,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	602.438.800,00	566.171.110,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.335.078.968,00	2.220.830.884,00
SURPLUS / DEFISIT	(21.507.042.785,00)	1.899.000.080,42

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin

http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

PEMBIAYAAN DAREAH	21.507.042.785,00	18.206.326.669,70
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.507.042.785,00	29.097.595.804,70
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.343.467.713,00	12.343.467.712,70
Penerimaan Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00	14.914.287.331,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.325.670.448,00	8.436.137,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	10.891.269.135,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.000.000.000,00	10.891.269.135,00
PEMBIAYAAN NETTO	21.507.042.785,00	18.206.326.669,70
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	20.105.326.750,12

Sumber: BPKAD Kota Tasikmalaya, 2025.

Anggaran dan realisasi APBD Kota Tasikmalaya tahun 2024 menunjukkan bahwa pendapatan daerah mencapai Rp 1.835.998.899.754,00, sedangkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 1.792.496.242.472,06. Perbedaan antara anggaran dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 43.502.657.281,94.

Pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 371.966.736.453,00, sedangkan realisasi PAD mencapai Rp 351.777.584.751,06. Perbedaan antara anggaran dan realisasi PAD sebesar Rp 20.189.151.701,94. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan terbesar dalam PAD, dengan anggaran sebesar Rp 163.574.975.200,00 dan realisasi sebesar Rp 168.952.023.618,00.

Pendapatan transfer mencapai Rp 1.464.032.163.301,00, sedangkan realisasi pendapatan transfer mencapai Rp 1.440.718.657.721,00. Perbedaan antara anggaran dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 23.313.505.580,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan sumber pendapatan terbesar dalam pendapatan transfer, dengan anggaran sebesar Rp 1.194.342.070.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.174.724.029.446,00.

Belanja daerah mencapai Rp 1.857.505.942.539,00, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp 1.790.597.242.391,64. Perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja daerah sebesar Rp 66.908.700.147,36. Belanja operasi merupakan komponen terbesar dalam belanja daerah, dengan anggaran sebesar Rp 1.688.823.665.450,00 dan realisasi sebesar Rp 1.635.468.452.199,64.

Belanja modal mencapai Rp 165.347.198.121,00, sedangkan realisasi belanja modal mencapai Rp 152.907.959.308,00. Perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja modal sebesar Rp 12.439.238.813,00. Belanja modal tanah merupakan komponen terbesar dalam belanja modal, dengan anggaran sebesar Rp 3.870.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 3.847.895.080,00.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mencapai Rp 15.000.000.000,00, sedangkan realisasi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mencapai Rp 10.891.269.135,00. Perbedaan antara anggaran dan realisasi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 4.108.730.865,00.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

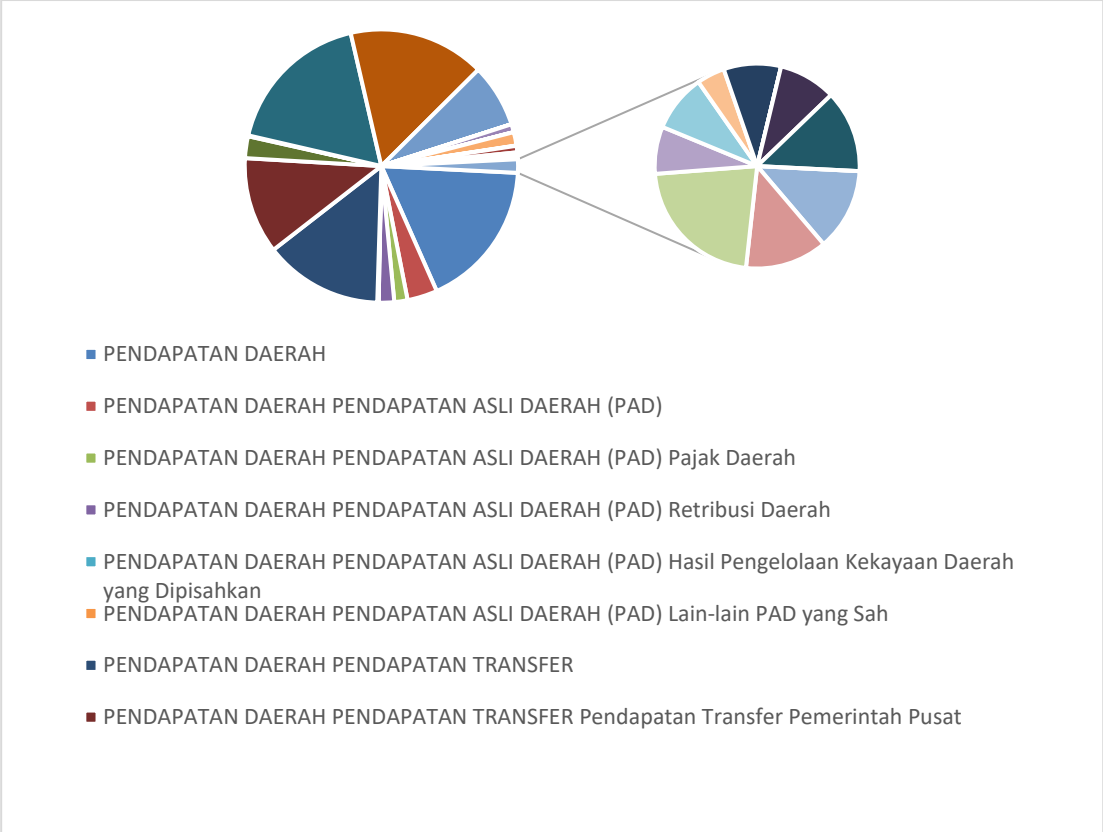
Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Gambar 1
Grafik APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2024



Analisis berdasarkan prinsip transparansi, proses perencanaan dan penggunaan anggaran APBD Kota Tasikmalaya tahun 2024 sudah terbuka dan mudah diakses publik. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal penyajian data dan informasi yang lebih rinci dan akurat. Dalam analisis berdasarkan prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah Kota Tasikmalaya sudah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal penyajian laporan keuangan yang lebih rinci dan akurat. Analisis berdasarkan prinsip efisiensi, penggunaan anggaran APBD Kota Tasikmalaya tahun 2024 sudah memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan prinsip keadilan, alokasi anggaran APBD Kota Tasikmalaya tahun 2024 sudah memenuhi kebutuhan masyarakat secara proporsional dan merata. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal penyaluran anggaran yang lebih adil dan merata. Sementara berdasarkan prinsip tanggung jawab, pemerintah daerah Kota Tasikmalaya sudah mengelola keuangan dengan integritas tinggi dan memastikan semua kewajiban terpenuhi tepat waktu. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dari prinsip partisipatif, masyarakat sudah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Tasikmalaya, namun demikian masih perlu peningkatan dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Sementara dari analisis berdasarkan prinsip tertib, pengelolaan keuangan APBD Kota Tasikmalaya tahun 2024 sudah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan terstruktur. Selanjutnya berdasarkan prinsip tepat waktu, pengelolaan keuangan APBD Kota Tasikmalaya tahun 2024 sudah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Terakhir dari analisis berdasarkan prinsip tidak bertentangan dengan kepentingan umum, pengelolaan keuangan APBD Kota Tasikmalaya tahun 2024 sudah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, namun demikian masih perlu peningkatan dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan data di atas bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya tahun 2024 menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pada sisi pendapatan, realisasi pendapatan daerah mencapai 97,6% dari target anggaran, dengan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 94,7% dari target. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai 98,7% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola pendapatan dengan cukup efektif. Pada sisi belanja, realisasi belanja daerah mencapai 96,5% dari target anggaran, dengan belanja operasi mencapai 96,8% dari target. Belanja modal mencapai 92,6% dari target, sedangkan belanja tidak terduga mencapai 66,5% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola belanja dengan cukup efektif, namun masih perlu memperhatikan belanja tidak terduga yang belum mencapai target.

Dalam hal surplus/defisit, pemerintah daerah mencatat surplus sebesar 1,9 triliun, yang berarti bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangan dengan baik dan tidak mengalami defisit. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola APBD dengan efektif dan efisien. Pengelolaan APBD Kota Tasikmalaya tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola pendapatan dan belanja dengan cukup efektif, serta mencatat surplus yang signifikan. Namun, masih perlu memperhatikan belanja tidak terduga yang belum mencapai target. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu terus memperbaiki pengelolaan APBD untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola keuangan daerah.

KESIMPULAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya tahun 2024 menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pemerintah daerah telah berhasil mengelola pendapatan dengan cukup efektif, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai 97,6% dari target anggaran, namun demikian masih perlu memperhatikan belanja tidak terduga yang belum mencapai target. Pemerintah daerah juga telah berhasil mengelola belanja dengan cukup efektif, dengan realisasi belanja daerah mencapai 96,5% dari target anggaran. Selain itu, pemerintah daerah telah mencatat surplus sebesar 1,9 triliun, yang berarti bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangan dengan baik dan tidak mengalami defisit. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah perlu terus memperbaiki pengelolaan APBD.

Meskipun realisasi pendapatan daerah mencapai 97,6% dari target anggaran, belanja tidak

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

terduga masih belum memenuhi target. Penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja tidak terduga ini. Hal ini dapat mencakup kajian tentang kebijakan penganggaran, prosedur pengeluaran, serta kebutuhan mendesak yang mungkin tidak teridentifikasi sebelumnya. Dengan memahami penyebabnya, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan penggunaan anggaran dalam kategori ini.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berhasil mencatat surplus sebesar 1,9 triliun, menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik. Namun, penting untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai surplus tersebut. Penelitian ini bisa melibatkan analisis kinerja program-program yang ada dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat serta efisiensi penggunaan anggaran.

REFERENSI

Antasena, D., Crisstin, Y., & Silawati, D. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Nian Tana Sikka*, *1*. https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/49

Gendong, A. E., Tameno, N., & Rozari, P. E. de. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai. *COMSERVA*, *3*. https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/download/1156/1460

Kuncoro, M. (2017). *Strategi*. Erlangga.

Mahmuda, D. (2019). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau. *Akuntansi Manajemen*, *2*. https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/jiam/article/view/343/270

Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.

Mulyadi, D. (2015). , *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*. Alfabeta.

Pavecta, N. T., Rizal, N., & Subani. (2017). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2017. *Riset Akuntansi*, *2*. http://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jra

Rinaldi, R., Hasibuan, A. P., Lubis, P. K. D., & Simanungkalit, J. (2024). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021-2023. *Ekonomi dan Keuangan*, *2*. https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/view/627

Rinaldi Rinaldi, Alawi Parkindungan Hasibuan, Putri Kemala Dewi Lubis, & Jelita Simanungkalit. (2024). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021-2023. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, *2*(2), 278–288. https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.605

S, L. S., Towendo, & Buhang, A. (2019). Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di KabupatenBanggai. *ILMIAHPRODUKTIF*, *7*. https://ojs-untikaluwuk.ac.id/index.php/jip

Syauqi, M., Siregar, H., & Syaukat, Y. (2017). Strategi Meningkatkan Efisinesi Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Pengelolaan APBD. *Manajemen Pembangunan Dareah*, *9*. https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/view/27540

Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Ivan Dicksan Hasannudin, Agus Fatah Hidayat, Arifah Rosmajudi, Astri Siti Fatimah, Deni Sudrajat, M. Ikrar Budijaya, Tine Badriatin
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.0rqhq505 to this article
Page 75-86
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Palembang. *Akuntansi*, *12*. https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/92

Wijayanti, D. I. S. (2008). *Manajemen*. Mitra Cendikia.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license